



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. DATA PRIBADI

: NOVI KHILA FIRANI 1. Nama

: WAKIL DEKAN BIDANG UMUM, KEUANGAN, DAN SUMBER DAYA 2. Jabatan

3. NHK : 635103

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

6.345.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 201 m2/256 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.110.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
- 3. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
- Tanah Seluas 216 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
- Tanah Seluas 437 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
- Tanah Seluas 1.690 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 240.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU, HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000
- Tanah Seluas 145 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
- 9. Tanah Seluas 1.322 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

584.000.000

MOTOR, YAMAHA XEON Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000





- MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
- MOTOR, YAMAHA FREE GO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
- MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

(C. HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	20.700.000
	D. SURAT BERHARGA	- N	- No	Rp.	at at
E	E. KAS DAN SETARA KAS	M	M	Rp.	2.093.000.000
F	. HARTA LAINNYA	-1	-1	Rp.	
PI	Sub Total	KPI	KPI	Rp.	9.042.700.000
III. HUTANG			Rp.		
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)			Rp.	9.042.700.000	

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.